

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Smart City* sebagai salah satu bentuk inovasi kebijakan terbaru oleh pemerintah dilatarbelakangi dengan keadaan Indonesia yang memiliki tingkat urbanisasi masyarakat dari desa ke kota yang cukup tinggi tiap tahunnya, hal ini mengakibatkan timbulnya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. *Smart City* (Kota Cerdas) menjadi solusi permasalahan perkotaan. Pasalnya, mengacu sebagaimana yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 bahwa sekitar diatas 55 % penduduk merupakan penduduk kawasan urban atau tinggal di kota dimana derajat urbanisasi yakni sekitar 2,5 % tiap tahunnya, sehingga pemerintah dapat memproyeksikan di tahun 2035 kondisi demografi dapat pada tingkatan 66% yang tinggal di wilayah perkotaan.<sup>1</sup>

Data BPS menunjukkan bahwa kawasan perkotaan mempunyai daya tarik masyarakat tersendiri yang menimbulkan berubahnya struktur tata guna lahan pada kawasan perkotaan dengan ditandai munculnya konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan. Fenomena ini berdampak pada munculnya isu permasalahan perkotaan, seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh kepada masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kota cerdas menjadi harapan dari pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan urban

---

<sup>1</sup> Kementrian Dalam Negeri. 2019. Mendagri: kota cerdas smart city jadi solusi permasalahan perkotaan. Diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/blog/31070-Mendagri-Kota-Cerdas-Smart-City-Jadi-Solusi-Permasalahan-Perkotaan> pada 3 September 2019

atau perkotaan sehingga dapat menguntungkan warga perkotaan pada umumnya.<sup>2</sup>

Adanya permasalahan yang timbul tersebut menekan pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut dapat mengembangkan kota agar tanggap dalam kehidupan berkelanjutan di masa depan. Fokus *Smart City* di Indonesia merupakan salah satu usaha yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa di wilayah sekitarnya.<sup>3</sup>

*Smart City* mendorong sebuah kota agar dapat berkinerja baik dengan memiliki pandangan yang berfokus pada perekonomian, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Sebuah kota yang dapat mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta dapat merencanakan pencegahannya yang dimana kegiatan ini dipercayakan dilakukan langsung oleh masyarakat. Dalam hal infrastruktur, *Smart City* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur guna meningkatkan kecerdasan kota karena pada prinsip awalnya *Smart City* membuat kota lebih efisien dan layak huni. Sebagai konsep kota cerdas, penggunaan *smart city* juga memanfaatkan era digitalisasi pada jaman

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Sanam, Linustri Tadius. 2017. *Teknologi, Urbanisasi, dan Smart City*. <https://timorexpress.fajar.co.id/2017/12/12/teknologi-urbanisasi-dan-smart-city/> diakses pada 26 Maret 2018.

sekarang yakni *smart computing* untuk membuat *smart city* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas dan saling berhubungan sehingga menciptakan keadaan yang sangat efisien.<sup>4</sup>

Maka dari itu, sebagai langkah konkrit pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada kebijakan tersebut telah mengamanatkan untuk melakukan pembangunan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi dan budaya lokal. *Pertama*, kebijakan pembangunan ekonomi untuk mengembangkan *city branding* yang mempromosikan *nation branding* atau pencitraan skala nasional. *Kedua*, menyiapkan sarana dan prasarana serta layanan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *Ketiga*, mengembangkan kemampuan masyarakat agar menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif.<sup>5</sup>

Pemerintah pusat pada dasarnya sudah memiliki visi untuk pengembangan *Smart City* yang berfokus pada penyediaan perkotaan yang tangguh dan tahan terhadap beberapa aspek seperti erusakan lingkungan dan bencana alam, sekaligus memperkuat standar layanan pemerintah untuk mendukung keperluan warga perkotaan dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>6</sup>

Visi tersebut dibagi menjadi tiga fase perencanaan pembangunan nasional

---

<sup>4</sup> Siti Mursalim Widoretno. 2007. Implementasi kebijakan *smart city* di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14 No 1 hal 132

<sup>5</sup> Op.Cit.

<sup>6</sup> Ibid

yang termuat dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yakni proyeksi RPJPN di tahun 2025-2035 berharap indikator standar pelayanan perkotaan (SPP) terpenuhi sesuai dengan kota layak huni, aman, dan nyaman. Tahun 2035-2045 indikator kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana terpenuhi di semua kota. Tahun 2045 ke atas diharapkan indikator kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota.<sup>7</sup>

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.<sup>8</sup>

Atas dasar hal tersebut, maka tahapan untuk menuju kota cerdas harus didukung juga oleh sinergitas dalam bentuk kerja sama yang dilaksanakan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan PP No. 28 tahun

---

<sup>7</sup>Dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Smart City Smart Region, Jumat (19/05/2017), di Jakarta. <https://ekon.go.id/berita/view/pemerintah-percepat.3344.html> diakses 03 September 2019.

<sup>8</sup>Loc.Cit Mursalim. Hal: 126.

2008 tentang Kerja sama daerah yakni dilaksanakan dalam konteks *smart economy* atau ekonomi cerdas; *smart people* atau masyarakat cerdas; *smart mobility* atau pergerakan masyarakat yang cerdas; *smart environment* atau lingkungan cerdas; dan *smart living* atau pengembangan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang cerdas. Beberapa aspek ini harus diintegrasikan ke dalam integrasi sistem pemberian layanan bersama organisasi pemerintahan dengan agensi atau pelaku bisnis dan juga sebaliknya sehingga memungkinkan penyampaian layanan yang efektif dan efisien kepada publik atau masyarakat secara umum.<sup>9</sup> dengan kata lain untuk mencapai keseluruhan aspek tersebut pemerintah bukan aktor dominan, melainkan membutuhkan pihak lain salah satunya yakni sektor privat atau bisnis demi optimalisasi sinergi tersebut.

Pengembangan TI dalam praktiknya juga mampu memberikan pengaruh pada berubahnya kehidupan masyarakat dan sistem tata kelola pemerintahan. Tentunya perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang positif, sehingga menjadi aspek yang menguntungkan untuk kehidupan masyarakat karena dapat meringankan dalam penyelesaian pekerjaan atau persoalan tertentu. Maka dari itu, disinilah salah satu inovasi terbaru yang dibuat oleh pemerintah hadir yakni adanya kebijakan *Smart City*, dimana *Smart City* merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang dibuat oleh pemerintah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. *Smart City* merupakan konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu kegiatan masyarakat dan

---

<sup>9</sup>Mendagri: *Kota Cerdas (Smart City) jadi Solusi Permasalahan Perkotaan* (15/05/2019).<https://www.kemendagri.go.id/blog/31070-Mendagri-Kota-Cerdas-Smart-City-Jadi-Solusi-Permasalahan-Perkotaan> diakses pada 03 September 2019.

memberikan kemudahan dalam mengakses informasi untuk masyarakat. Saat ini dengan era digitalisasi pemerintah melihat pemanfaatan aspek TI yakni sebagai bentuk optimalisasi peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik.<sup>10</sup>

Tujuan melaksanakan pengembangan *smart city* adalah untuk mengembangkan kehidupan dalam konteks memanfaatkan informasi dan teknologi di wilayah kota untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengatasi permasalahan publik. Selanjutnya aspek TIK menjadi sarana yang mendukung adanya interaksi pemerintah dengan masyarakatnya stakeholder lainnya serta bermanfaat dalam hal pemantauan aset-aset atau sarana perkotaan. Maka dari itu, perlu adanya kontrol secara berkala dan rutin agar kejadian kehidupan masyarakat dapat diketahui secara tepat waktu. Karena pada dasarnya informasi yang dapat diakses menggunakan media teknologi, informasi, dan komunikasi dapat menjadi solusi dari tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama ini.<sup>11</sup>

Selain itu, *smart city* yang mendapat dukungan dari masyarakat perkotaan yang memiliki kualitas SDM unggul atau sebagai *smart people* dalam konteks penggunaan teknologi pasti memiliki kesadaran akan kondidi kotanya. Karena *smart city* mencakup banyak hal yang diantaranya yakni aspek manusianya, teknologi, dan institusional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Utomo, Chandra Eko Wahyudi dan Mochamad Hariadi. 2016. *Strategi pembangunan smart city dan tantangan bagi masyarakat kota*. Jurnal Strategi dan Bisnis. Vol 4 No 2 Hal 160.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm: 160-161.

<sup>12</sup> Taewoo Nam & Theresa A. Pardo. 2011. *Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research*. (dalam buku Nurmandi, Ahmad. 2014. *Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*).

Sehingga dapat dikatakan bahwa *smart city* atau kota cerdas juga mengacu kepada kota yang memiliki manusia, pendidikan, dan pengetahuan yang menjadi unsur penting kota cerdas. Infrastruktur sosial dan intelektual yang berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kekayaan sosial, kekayaan budaya dan potensi ekonominya.<sup>13</sup>

Sebagai masalah teknologi, *smart city* didefinisikan sebagai kota yang didasarkan pada penggunaan aspek TIK dalam kehidupan masyarakatnya. *Smart city* juga disebut sebagai kota informasi, kota campuran, kota digital dan banyak lagi, di mana ada alat untuk memindahkan populasi perkotaan sebagai smartcard, yang dimanfaatkan untuk bermacam keperluan, dari transportasi, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan dan dan berbagai bentuk layanan lainnya.<sup>14</sup>

Sementara itu, *smart city* dalam faktor institusional atau kelembagaan didefinisikan menjadi kota yang mana masyarakatnya dapat meliputi pihak organisasi pemerintahan, sektor privat, dan masyarakat secara umum mampu atau memiliki kapasitas dalam penggunaan aspek TIK dan juga kota dimana kebijakan dapat ditentukan dengan bantuan aspek TIK yang tersedia demi kebaikan kota tersebut.<sup>15</sup>

Dalam rangka merealisasikan *smart city*, perlu melihat dari dekat berbagai elemen kunci termasuk tiga faktor di atas untuk mewujudkan

---

<sup>13</sup> Bartlett, L. (2005). *Smart city: Social Entrepreneurship and community engagement in a rural regional city*. In Proceedings of the International Conference on Engaging Communities, (Brisbane, Australia, Aug 14-17). Available at <http://www.engagingcommunities2005.org/abstracts/Bartlet-Leo-final.pdf> (dalam buku Nurmandi, Ahmad. 2014. *Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*).

<sup>14</sup> Nurmandi, Ahmad. 2014. "*Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*". Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY). Hal: 400.

<sup>15</sup> *Ibid.*

berbagai komponen kota yang cerdas, yang biasanya mencakup enam dimensi penting., yaitu *a smart economy, a smart mobility, a smart environment; smart people; a smart living; dan smart governance.*<sup>16</sup>

Selain menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia, konsep kota cerdas atau *smart city* juga mulai diterapkan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, ada 15 kota yang telah menerapkan *smart city* seperti yang dilansir oleh salah satu media online pada 11 Desember 2017 bertempat di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada 15 kota di Indonesia yang masuk ke dalam kategori utama Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017, yaitu Rating Menuju Cerdas (*Smart City*). Kegiatan ini adalah hasil tindak lanjut dari rangkaian kegiatan survei dan kajian kesiapan kota cerdas terhadap 93 kota di seluruh Indonesia yang dibuka Wapres pada 4 Mei 2017 lalu.<sup>17</sup> Terdapat tiga kategori dalam 15 kota yang mendapat rating kota cerdas yaitu Kota Besar diraih Surabaya, Bandung, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, sedangkan kategori Kota Sedang diraih Denpasar, Binjai, Manado, Yogyakarta, Kediri, serta kategori yang terakhir yaitu Kota Kecil diraih Magelang, Sawahlunto, Bontang, Tual, dan Bukittinggi.<sup>18</sup>

Merujuk pada hadirnya kebijakan *smart city* sebagai salah satu inovasi dalam mengembangkan serta memajukan sebuah kota agar menjadi kota layak huni yang lebih baik dengan kehidupan berkelanjutan, adapun sebagai berikut adalah contoh-contoh *smart city* yang sudah diterapkan di Indonesia

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm: 401.

<sup>17</sup><https://inixindojogja.co.id/kota-kota-di-indonesia-ini-sudah-menerapkan-smart-city/> diakses pada 26 Maret 2019.

<sup>18</sup>*Ibid*



yang dijadikan bahan acuan untuk kota-kota yang belum menerapkan kebijakan tersebut, *smart city* yang ada di Indonesia berikut dengan penjelasan latar belakangnya, seperti Kota Makassar yang pengembangan kota cerdas dimulai dari permasalahan perkotaan yang meliputi beberapa aspek kriminalitas yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya. Hal ini tentunya berbeda dengan praktik pengembangan kota cerdas di Jakarta yang mana bermanfaat sebagai penunjang sistem informasi yang sangat perlu untuk diintegrasikan dan ditampilkan mengingat Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia yang harus lebih maju dari kota-kota besar lainnya di Indonesia serta sebagai salah satu bagian besar pusat perekonomian dan pemerintahan negeri ini.<sup>19</sup>

Kota berikutnya adalah Kota Bandung, sebagai kota yang memiliki daya tarik pariwisata, Pemerintah Kota Bandung berupaya memberikan baik baik pengunjung kota tersebut dengan menggunakan salah satu terobosan-terobosan baru untuk dapat mempercantik, mengembangkan serta memajukan Kota Bandung sebagai salah satu kota terlayak untuk dihuni dan menjadi *smart city* no 1 di Asia. Kota Bandung mengalami perkembangan yang cepat dan akan terus mengalami kemajuan dikemudian harinya. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut menyebabkan warga di kota tersebut juga mendapatkan dampak positif yakni kenyamanan bertempat tinggal di kota itu.

---

<sup>19</sup> Utomo, Chandra Eko Wahyudi & Hariadi, Mochamad. 2016. *Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota*. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol.4, No.2. Hlm: 170.

Hal ini pula yang mendasari Pemerintah Kota Bandung untuk terus aktif berinovasi dalam kemajuan Kota Bandung.<sup>20</sup>

Selain kota-kota besar yang telah dijelaskan diatas, masih ada beberapa kota besar di Indonesia yang telah mulai menerapkan *Smart City* seperti Bogor, Surabaya dan Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan Yogyakarta *Smart City*, Pemerintah Kota Yogyakarta memulainya dari mengimplementasikan *e-government* yang dimana ini menjadi sebuah keharusan, visi dari implementasi ini terdapat dalam dokumen master plan *e-government* yang ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 tahun 2015 tentang *e-Government* yaitu “Terwujudnya *e-Government* sebagai sarana sistem informasi pengelolaan Kota Yogyakarta yang handal dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga menjadi Yogyakarta *Smart City*”.<sup>21</sup>

Kebijakan *Smart City* yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Indonesia ini tidak lepas dari adanya kendala-kendala yang harus dihadapi mulai dari tahap kesiapan hingga pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada dasarnya kesiapan *smart city* di Indonesia didasari oleh latar belakang yang berbeda dari setiap daerahnya, perbedaan latar belakang ini merujuk pada sesuatu yang berbeda menyangkut keunggulan dari daerah masing-masing bagi dari segi SDA maupun SDM yang dapat menunjang dampak dari dilaksanakan pengembangan kota cerdas di daerah tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm: 167.

<sup>21</sup>ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM. 2016. Hlm: 01. [https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta\\_UPLOAD\\_web-1.pdf](https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf) diakses pada 05 Maret 2018.

<sup>22</sup> Loc Cit Utomo dan Hariadi Hlm: 162.

Kesiapan yang dimaksud merupakan bagian dari kerangka dalam analisis proses kebijakan, suatu analisis kebijakann publik yakni subbidang yang bersifat teknis dan konten analisisnya tidak hanya dapat ditentukan atas dasar batasan disiplin tertentu, namun atas dasar aspek-aspek yang tampaknya memiliki kesesuaian dengan kondisi waktu dan persoalan tertentu.(Wildavsky, 1979:15 dalam Parson 2005:30).<sup>23</sup> Selanjutnya, merujuk pada pandangan dari Parsons yakni pada umumnya dalam analisis kebijakan publik memiliki dua jenis pendekatan yang mana meliputi analisis terhadap proses suatu kebijakan publik dan pemakaian teknik tertentu dalam suatu analisis kebijakan publik. Hal inilah yang dikatakan Parsons sebagai analitis dalam dan untuk proses kebijakan.

Selanjutnya Parsons menjabarkan mengenai analisis proses yakni strategi mengidentifikasi masalah, *agenda setting*, menyusun kebijakan, membuat keputusan, implementasikan dan evaluasi kebijakan. Sedangkan analisis dalam dan analisis proses kebijakan digambarkan oleh Parsons sebagai studi tentang pemakaian teknik analisis, penelitian, dan advokasi dalam penentuan masalah, penentuan keputusan, implementasi dan aspek evaluasi kebijakan.<sup>24</sup>

Kebijakan *smart city* yang mulai gencar disosialisasikan oleh pemerintah pusat ke seluruh wilayah Indonesia agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan di setiap kota di Indonesia, Kota Palangkaraya adalah salah

---

<sup>23</sup> Tia, Chintia. 2019. *Public Policy*. [https://www.academia.edu/6526200/Review\\_wayne\\_parson](https://www.academia.edu/6526200/Review_wayne_parson) diakses pada 12 Mei 2019.

<sup>24</sup> Muadi, Sholih dkk. 2016. *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02. Hlm: 199.

satu Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang berproses dalam kesiapan untuk menerapkan kebijakan *smart city* tersebut.

Kota Palangkaraya memiliki begitu banyak sejarah dalam perjuangan pendiriannya. Salah satunya adalah pada tahun 1957, keinginan dari Presiden Pertama Indonesia yaitu Bapak Ir. Soekarno untuk merancang Kota Palangkaraya menjadi ibukota negara. Wacana pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan ini berkembang di setiap masa pemerintahan sejak era Presiden Soekarno, Soeharto sampai terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana ini terus berkembang tanpa pernah direalisasikan. Dalam buku berjudul “Soekarno & Desain Rencana Ibukota RI di Palangkaraya” karya Wijanarka disebutkan bahwa dua kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan.<sup>25</sup>

Kota Palangkaraya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari berbagai macam masalah perkotaan. Kota Palangkaraya memiliki hal-hal penting yang menjadi dasar pokok permasalahan dalam proses kesiapan menuju *Smart City*, pokok permasalahan yang pertama adalah institusi. Institusi yang dimaksudkan disini yaitu Pemerintah Kota Palangkaraya itu sendiri sebagai motor penggerak dari awal mulanya kebijakan *Smart City* di Kota Palangkaraya, pada pertengahan tahun 2016 Walikota Palangkaraya periode 2013-2018 HM Riban Satia didampingi oleh PLT (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Kandarani Syahdan dan sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemerintah Kota

---

<sup>25</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/> diakses pada 03 Januari 2018.

Palangkaraya berkesempatan hadir pada pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan *Smart City*.<sup>26</sup> *Smart city* akan dijadikan gerakan nasional dan *event ISCF (Indonesian Smart City Forum)* yang wajib diikuti oleh semua Kepala Daerah. Pemerintahan berbasis elektronik tidak bisa dihindari lagi, melalui gerakan ini diharapkan Indonesia tidak kalah dengan negara maju, gerakan ini bisa memotong separuhnya dari road map *e-government*. Forum ini merupakan salah satu sarana belajar untuk daerah-daerah yang belum menerapkan *smart city* dengan cara mencontoh atau meniru daerah lain yang telah menerapkan *smart city* di daerahnya dan ini merupakan salah satu bentuk tindakan untuk dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang modern.<sup>27</sup>

Kebijakan *smart city* hadir sebagai solusi kehidupan berkelanjutan yang modern juga menjadi sasaran politik, salah satu bentuk keberpihakan politik pada pembangunan *smart city* dapat dilihat melalui visi dan misi Walikota Palangkaraya Periode 2018-2023 Fairid Naparin, SE dan Wakil Walikota Palangkaraya Periode 2018-2023 Hj. Umi Mastikah, SH. Pembangunan *smart city* menjadi salah satu point penting dalam visi misi walikota tersebut demi memajukan Kota Palangkaraya. Keberpihakan politik terhadap *smart city* ini juga sebagai salah satu upaya dalam memasifkan gerakan kebijakan *smart city* yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah masing-masing daerah, selain

---

<sup>26</sup> Kegiatan yang dimaksud yaitu sosialisasi oleh pemerintah pusat dengan tema "*Indonesian Smart City 2016*" yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, bertempat di The Trans Luxury Hotel, jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat 02/09/2016. <https://palangkaraya.go.id/indonesia-smart-city-2016/> diakses pada 24 Agustus 2018.

<sup>27</sup> *Ibid.*

menjadi kewajiban pemerintah daerah, pembangunan *smart city* juga tidak lepas dari peran penting masyarakat daerah, yang mana masyarakat daerah juga harus paham betul terhadap kelangsungan kehidupan berkelanjutan yang modern dan masuknya *smart city* sebagai salah satu visi misi walikota agar kebijakan tersebut dapat diperkenalkan secara baik kepada masyarakat setempat.

Keseriusan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempersiapkan kebijakan *smart city* dapat terlihat pada Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara dengan tema “Kalimantan Untuk Indonesia Menuju Ibukota Masa Depan: *Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable*”, yang dimana kegiatan dialog tersebut dilaksanakan pada Jum’at 19 Juli 2019 di Ballroom Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sosialisasi dari kegiatan tersebut di sebar melalui media sosial seperti *fanpage* Facebook dari akun resmi Pemerintah Kota Palangkaraya dan Kementrian PPN/Bappenas serta melalui aplikasi chat Whatsapp yang kemudian disebar ke semua jajaran Pemerintah Kota Palangkaraya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pokok permasalahan kedua yakni SDM (Sumber Daya Manusia). Sumber daya manusia yang dimaksud adalah baik dari masyarakat maupun aparatur pemerintah itu sendiri, hal utama yang menjadi dasar permasalahan adalah *mindset* atau pola pikir mengenai konsep kemajuan jaman yang mana telah berubah secara drastis, segala aspek kemajuan jaman yang terlihat sudah sangatlah jelas seperti kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang, semua berlaku instan dan bersifat memudahkan. Sumber daya manusia juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam bidang tertentu agar dapat

bekerja secara maksimal dan bertanggungjawab sesuai dengan bidang yang digeluti.

Sumber daya manusia bidang pemerintah yakni yang kita kenal dengan aparatur sipil negara pun tidak lepas dari aspek ini, aparatur sipil negara haruslah bermental melayani rakyat dengan efektif, cepat, dan efisien sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak jarang ada beberapa aparatur sipil negara yang masih bermental korup dan tidak mau belajar lebih untung menghadapi tantangan masa depan dan berfikir pesimis, seperti yang saya temui pada saat wawancara mengenai kesiapan kebijakan *smart city* di Kota Palangkaraya, salah satu staff dari bidang hukum pemerintah kota memberikan pernyataan bahwa “*kebijakan smart city di Kota Palangkaraya mungkin tidak dapat direalisasikan, karena bagaimana caranya untuk kita bisa merealisasikan kebijakan tersebut...*”. Hal sebagaimana diatas merupakan kendala yang saya temui di lapangan, bagaimana mungkin seorang ASN berfikir pesimis pada kebijakan pemerintah yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk memajukan daerahnya dan kebijakan tersebut sudah dalam proses pembahasan.<sup>28</sup>

Selain instansi dan sumber daya manusia, pokok permasalahan yang ketiga yaitu regulasi. Kebijakan *smart city* yang akan diterapkan di suatu daerah haruslah memiliki regulasi atau landasan hukum yang jelas sebagai dasar dalam melaksanakan kebijakan tersebut nantinya dan merupakan salah satu dari proses kesiapan kebijakan *smart city*. Payung hukum yang ada sekarang secara parsial sudah ada tetapi belum mampu mengakomodir secara

---

<sup>28</sup> Wawancara 11 Maret 2019 di Kantor Walikota Palangkaraya.



keseluruhan kebijakan *smart city* tersebut. Seperti yang terjadi di Kota Palangkaraya, pada saat sekarang regulasi yang dimiliki terkait kebijakan *smart city* hanya tertuang dalam RPJMD Kota Palangkaraya 2018-2023 yang tertaut pada kalimat Visi dan Misi Walikota Palangkaraya.

Pokok permasalahan yang terakhir yaitu *branding*, *branding* atau *city branding* dapat diartikan sebagai strategi atau proses pembentukan merek suatu kota dalam berbagai bentuk media promosi agar dikenal oleh masyarakat luas, dengan kata lain bahwa *branding* sangat diperlukan sebagai media sosialisasi dan meningkatkan motivasi dalam mensukseskan *smart city*.<sup>29</sup> Kota Palangkaraya sendiri masih belum memiliki *branding* untuk kebijakan *smart city* tersebut.

Pokok-pokok permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas yang sedang terjadi di Kota Palangkaraya, oleh sebab itu Pemerintah Kota Palangkaraya perlu meningkatkan responnya dalam menangani setiap permasalahan yang ada di kota. *Smart City* merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat membantu pemerintah dalam menjawab setiap permasalahan perkotaan yang ada.

Maka dari itu, baik permasalahan yang ada maupun setiap potensi yang ada di Kota Palangkaraya harus benar-benar bisa dioptimalkan dan dicarikan solusinya untuk dapat membangun kota ini menjadi lebih baik serta sebagai pembangunan yang berkelanjutan untuk warga masyarakatnya. Impian menjadi kota cerdas pasti dimiliki oleh semua kota yang ada di dunia, tidak

---

<sup>29</sup>ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM, 2016. Hlm: 25. [https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta\\_UPLOAD\\_web-1.pdf](https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf) diakses pada 05 Maret 2018.



terkecuali Kota Palangkaraya salah satunya, dalam proses mewujudkan kota cerdas tersebut tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju *SmartCity*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju *Smart City*?
2. Apa saja program-program yang akan dicanangkan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju *Smart City*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Memperoleh gambaran yang jelas kesiapan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju *Smart City*.
2. Mengetahui program-program yang akan dicanangkan oleh Pemerintah Kota untuk menunjang kesiapan Kota Palangkaraya menuju *Smart City*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari salah satu kajian dalam studi Ilmu Pemerintahan, adapun mata kuliah yang sangat berkaitan erat dengan penelitian ini adalah Teori dan Praktik Desentralisasi, dimana dalam mata kuliah ini kita dapat melihat bagaimana praktik desentralisasi yang tergambar secara umum di daerah, khususnya Kota Palangkaraya, yaitu dengan adanya kewenangan yang dipegang oleh pemerintah kota untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam memajukan dan mengembangkan kota menjadi kota yang lebih baik, berkemajuan dan aman untuk masyarakatnya. Mata kuliah kedua yang berkaitan adalah Urban Politik, dimana fokus dari urban politik itu sendiri adalah masalah pengelolaan perkotaan, bagaimana pemerintah mengelola kota sebagai pelayan publik serta hal apa yang mendasari pemerintah melakukan pilihan kebijakan perkotaan tertentu dan dampak yang ditimbulkan atas pilihan kebijakan tersebut. Tidak hanya pemerintah, warga masyarakat pun memiliki andil yang besar dalam perkembangan kemajuan suatu kota yang berdampak pada kehidupan berkelanjutan di masa depan.

Mata kuliah ketiga yang berkaitan adalah Kebijakan Publik, kebijakan publik hadir sebagai keputusan politik yang diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan sedang berkembang di masyarakat, dalam hal ini *Smart City* sebagai suatu produk dari lahirnya kebijakan publik oleh pemerintah yang merupakan

salah satu cara dalam memecahkan persoalan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Adapun mata kuliah ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana produk atau program dari kebijakan pemerintah yang telah diputuskan tadi yakni *Smart City*, menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan daerah yang telah direncanakan tersebut baik yang dimuat dalam RPJP, RPJM, Renstra, RKPD, maupun Renja SKPD.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Sebagai sumbangsih pengkayaan kajian akademis terhadap Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota sebagai penentu kebijakan terhadap peran pemerintah melalui SKPD terkait dalam melaksanakan program dari kebijakan yang telah ditentukan, sehingga kedepannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada sehingga efektif dan efisien serta keberhasilan yang dicapai akan berada pada tingkat yang memuaskan.

### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai informasi mengenai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini yaitu *Smart City* yang merupakan sebuah inovasi serta pemecah masalah dalam perkembangan perkotaan pada jaman digitalisasi ini, yang mana di dalamnya perlu peran aktif masyarakat sebagai faktor pendukung dan mengawasi bagaimana jalannya program-program dari proses kebijakan tersebut.

### **c. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur bagi mereka yang tertarik dengan tema penelitian yang sama maupun studi lanjutan yang lebih komprehensif baik sebagai kontribusi dan bahan evaluasi.

### **E. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Menurut Singarimbun dan Effendi, definisi konsep merupakan generalisasi dan sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan, dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memaknainya.<sup>30</sup> Definisi konsep dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat melakukan analisis lebih lanjut tentang kesiapan sebuah kota menuju *smartcity* yang difokuskan pada proses kesiapan kebijakan *smart city* yang akan diterapkan di Kota Palangkaraya. Adapun dalam hal ini didasarkan pada konsep sebagai berikut:

#### **1. Analisis Kesiapan**

Kesiapan merupakan pernyataan siap dari seseorang, sistem atau organisasi untuk memenuhi dan melaksanakan sebuah kegiatan yang terencana. Kesiapan ini berdasarkan pada ketelitian perencanaan,

---

<sup>30</sup>Chourmain, S Imam. 2008. *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House. Hal: 36.

kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan dari sistem.<sup>31</sup> Kesiapan dapat diawali dengan studi literatur untuk mengetahui indikator-indikator mengenai objek yang akan diteliti. Setelah penentuan indikator dan tolok ukur maka dilakukan survei data yang dibutuhkan, kemudian mengolah data survei dan dilakukan analisis serta penilaian mengenai kondisi yang sedang berlangsung pada saat objek diteliti.<sup>32</sup>

Analisa kesiapan yang dimaksud merupakan bagian dari kerangka dalam analisis proses kebijakan. Parsons lebih lanjut yakni menjabarkan apabila analisis dari proses suatu kebijakan publik yakni menyangkiy upaya untuk mengidentifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan; implementasi, dan evaluasi kebijakan.<sup>33</sup>

## 2. *Smart City*

Pengembangan tata kelola kota dalam praktiknya sudah melalui adanya perkembangan dan perubahan yang dikarenakan dengan diiringi oleh adanya perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi secara beriringan. Kajian mengenai tata kelola kota tidak hanya menyangkut pelayanan publik dasar atau terkait penataan pedagang dan terkait transportasi serta aspek permukiman, akan tetapi juga menyentuh aspek pemanfaatan teknologi informasi dan

---

<sup>31</sup> Habiburrahman. 2017. *Analisis Tingkat Kesiapan Implementasi Teknologi Informasi di Perpustakaan Pusat UIN Sumatera Utara Medan*. Tesis. Hal: 21.

<sup>32</sup> ROAD MAP KOTA YOGYAKARTA MENUJU SMART CITY. Tim PSPPR UGM, 2016. Hlm: 07. [https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta\\_UPLOAD\\_web-1.pdf](https://psppr.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/49/2017/04/Working-Paper-Smart-City-Yogyakarta_UPLOAD_web-1.pdf) diakses pada 05 Maret 2018.

<sup>33</sup> Tia, Chintia. 2019. *Public Policy*. [https://www.academia.edu/6526200/Review\\_wayne\\_parson](https://www.academia.edu/6526200/Review_wayne_parson) diakses pada 12 Mei 2019.

komunikasi dalam mengatur kehidupan masyarakat perkotaan. Selain itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga akan sangat bermanfaat dalam aspek lainnya baik dalam konteks pendidikan, kesehatan, maupun keamanan kota. Sehingga dapat mewujudkan kota cerdas baik dari segi kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya yang mana meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>34</sup>

Selain itu, *smart city* atau kota cerdas juga harus memuat aspek teknologi dan kelembagaan. Dalam konteks aspek teknologi tentunya kota cerdas harus mendapat dukungan dari ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Sedangkan *smart city* dalam konteks kelembagaan yakni harus ada dukungan dari segala elemen lingkungan perkotaan yang mana meliputi organisasi pemerintahan; sektor swasta atau bisnis, dan juga masyarakat setempat yang tentunya harus memiliki kemampuan pemahaman teknologi yang baik.<sup>35</sup>

Sementara itu, agar penerapan kota cerdas atau *smart city* tersebut dapat sesuai dengan 3 faktor penting yakni manusia, teknologi, dan kelembagaan.<sup>36</sup> Maka diperlukan beberapa komponen yang meliputi

---

<sup>34</sup>Loc.Cit. Nurmandi. Hal: 399-400.

<sup>35</sup>*Ibid.* Hal: 400.

<sup>36</sup> Faktor-faktor kota cerdas menurut Taewoo Nam & Theresa A. Pardo yaitu 1. Institution Factors (Governance, Policy, Regulation/directive); 2. Technology Factors (Physical infrastructure, Smart technologies, Mobile technologies, Virtual technologies, Digital networks); 3. Human Factors (Human infrastructure, Social capital). (dikutip dari Nurmandi, Achmad. 2014. *Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*. Yogyakarta: JKSG UMY. Hal: 401).

*smart ekonomi, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living.*<sup>37</sup>

Kota dengan dimensi ekonomi yang cerdas adalah kota yang ekonominya berbasiskan pada jasa pengetahuan dan kreativitas manusianya mengeksploitasi pengetahuan tersebut. Secara implisit kota cerdas mengandalkan sektor jasa yang didukung oleh penduduk kota yang kreatif dengan mengandalkan pengetahuannya, seperti jasa industri kreatif, pendidikan, kreativitas seni, kreativitas industri informasi dan sejenisnya.<sup>38</sup>

Kota ekonomi cerdas adalah kota yang ekonominya didasarkan pada layanan pengetahuan dan kreativitas manusia menggunakan pengetahuan tersebut. Kota pintar jelas tergantung pada sektor jasa yang didukung oleh penduduk kota yang menggunakan pengetahuan, seperti industri industri kreatif, pendidikan, kreativitas artistik, kreativitas industri informasi, dan banyak lagi.

Kota cerdas juga didukung oleh sarana transportasi yang berbasis teknologi dan informasi yang unggul dan terintegrasu antara berbagai macam saran transportasi yang ada dengan hanya menggunakan kartu tertentu yang multi guna. Transportasi bus terkoneksi dengan transportasi kereta dan transportasi lainnya. Kartu cerdas ini didukung oleh industri perbankan, sehingga memudahkan masyarakat untuk

---

<sup>37</sup>*Ibid.* Hal: 401.

<sup>38</sup>Nurmandi, Ahmad. 2014. "Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas". Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY). Hal: 401.

melakukan pengisian ulang saldo kartu tersebut di setiap pemberhentian moda transportasi yang terkoneksi.<sup>39</sup>

Selain itu, smart city harus pula memiliki aspek lingkungan yang cerdas di mana pengelolaan sampah dapat berkelanjutan melalui daur ulang. Sehingga terwujud kota yang bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakatnya. Lebih lanjut, *smart city* yang terpenting yakni mendapatkan dukungan dari kompetensi SDM masyarakat yang mampu dan memahami menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan tepat, sehingga dapat menjadi pendukung dari manajemen perkotaan kota cerdas yang telah diusung oleh pemerintah.<sup>40</sup>

### 3. Tatakelola Cerdas

Tatakelola cerdas mencakup unsur-unsur partisipasi didalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, pemerintah yang transparan dan perspektif politik. Untuk menunjang unsur-unsur ini, pemerintah kota harus memiliki *e-government* yang baik, yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan dunia swasta. Informasi dari masyarakat disampaikan melalui website pemerintah dan diolah untuk membuat keputusan. Informasi dan keluhan masyarakat juga dapat disampaikan dengan sms, fax, email atau secara langsung mengakses situs yang ada.<sup>41</sup>

Pertumbuhan *e-government* di Indonesia masih jauh dari bagian dunia lainnya. Indonesia baru saja mengeluarkan kebijakan khusus

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal: 402.

<sup>40</sup>*Ibid*, hal: 403.

<sup>41</sup>*Ibid*, hal: 405.



terkait pelaksanaan e-government di tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 pada tahun 2003.<sup>42</sup>

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya.<sup>43</sup> Adapun indikator-indikator dalam kesiapan Kota Palangkaraya menuju *smart city* adalah sebagai berikut:

### **1. Kesiapan Infrastruktur**

- a. Infrastruktur Fisik
- b. Infrastruktur Digital
- c. Infrastruktur Sosial

### **2. Kesiapan Suprastruktur**

- a. Kesiapan Kebijakan Daerah
- b. Kesiapan Kelembagaan Daerah
- c. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

### **3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

- a. Kualitas Pembangunan Manusia
- b. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

### **4. Sasaran Strategis Enam Elemen *Smart City* di Kota Palangkaraya**

- a. *Smart Governance*

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Chourmain, S Imam. 2008. *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House. Hal: 36-37.

*b. Smart Environment*

*c. Smart Society*

*d. Smart Economy*

*e. Smart Living*

*f. Smart Branding*

## **5. Roadmap Implementasi TIK di Kota Palangkaraya**

a. Infrastruktur TIK

b. Perangkat Lunak dan Aplikasi Sistem Informasi

c. Sumber Daya Manusia

d. Tata Kelola TIK

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretative karena data hasil lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>44</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pemodelan data kualitatif dengan program NVivo, dimana NVivo merupakan perangkat lunak yang bermanfaat untuk membantu riset kualitatif secara efisien. NVivo membantu untuk mengklasifikasikan data-data dalam penelitian, hal ini akan

---

<sup>44</sup>Prof. Dr. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal: 7-9.

memperudahkan peneliti untuk melakukan review terhadap literatur, menganalisis kecenderungan kata yang sering muncul, dan menemukan hubungan antara kata yang sering muncul dengan kata-kata lainnya.<sup>45</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Penelitian ini merupakan landasan agar dapat mendeskripsikan secara jelas mengenai objek dan subjek yang akan diteliti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana kesiapan Kota Palangkaraya menuju *smart city*.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek atau unit penelitian sebagai sumber data yang diperoleh dari lapangan, adapun sumber data yang dimaksud adalah:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>46</sup> baik dengan cara tertentu atau pada periode tertentu. Sumber data ini diperoleh dari orang pertama (informan atau narasumber), yang mana penulis dapatkan melalui interaksi secara langsung dengan melakukan wawancara, dialog atau langsung terjun ikut dalam suatu kegiatan untuk dapat memperoleh secara nyata data yang dibutuhkan, adapun sumber data primer

---

<sup>45</sup><http://fisipol.ugm.ac.id/menguasai-analisis-data-kualitatif-menggunakan-nvivo/> diakses pada 14 Agustus 2019.

<sup>46</sup>Prof. Dr. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal: 225.

peneliti adalah para pemangku kepentingan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data,<sup>47</sup> sumber data yang dikumpulkan atau didapatkan melalui dokumen, catatan, laporan historis yang telah tersusun berupa arsip, buku, jurnal, artikel, berita, dll. Sumber data sekunder ini merupakan data penunjang dari sumber data primer, adapun sumber data sekunder yang peneliti dapat yakni dari berbagai jurnal penelitian-penelitian terdahulu terkait kebijakan *smart city*, seluruh berita mengenai *smart city* baik media maupun cetak, buku serta artikel terkait lainnya.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>48</sup> Untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara)

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara ini responden diberi pertanyaan dan pengumpul data mencatatnya. Dalam proses melakukan wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

wawancara menjadi lancar.<sup>49</sup> Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu pada lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, DPRD Kota Palangkaraya serta instansi dan pihak terkait lainnya.

b. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan langsung di Kota Palangkaraya khususnya pada lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, DPRD Kota Palangkaraya dan pihak terkait lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto yang diambil pada saat berlangsungnya observasi atau wawancara tersebut.<sup>51</sup>

## I. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau individu yang dipilih untuk dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

---

<sup>49</sup>*Ibid.* Hal: 138.

<sup>50</sup>*Ibid.* Hal:145.

<sup>51</sup>*Ibid.* Hal: 240

dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana merupakan salah satu teknik sampling non random sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki sebab mereka memiliki informasi tersebut dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>52</sup> Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Walikota Palangkaraya
- b. Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya
- c. Staff DPRD Kota Palangkaraya
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya.
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya.
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangkaraya.

#### **J. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya terhadap sasaran penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

---

<sup>52</sup> Ferdinand, Augusty. 2014. Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal: 179.

## K. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>53</sup>

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>54</sup>

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

---

<sup>53</sup>Prof. Dr. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal: 244.

<sup>54</sup>*Ibid.* Hal: 246.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan menjadi kesimpulan final.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Hariyanti, Mey. 2015. *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*.  
<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman> diakses 14 Agustus 2019.